



MATERI 1 KETENTUAN UMUM

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Tujuan Umum Pelatihan

Peserta mampu memahami ketentuan umum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)



Tujuan Khusus Pelatihan

Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan Peserta Mampu Memahami:

- Pengertian terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
- Ruang Lingkup PBJP
- Jenis Pengadaan pada PBJP
- Cara Pelaksanaan PBJP



- Pengertian terkait PBJP
- Ruang Lingkup PBJP
- Jenis Pengadaan pada PBJP
- Cara Pelaksanaan PBJP



Mengapa PBJP Perlu Diatur?



PBJP merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Negara sehingga perlu pengaturan tata kelola (*Good Governance*) dan akuntabilitas



PBJP berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional



Struktur Perpres No 16/2018

15 bab BAB III BAB II BAB I PELAKU PENGADAAN TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA KETENTUAN UMUM **94** Pasal BARANG/JASA PENGADAAN BARANG/JASA BAB V **BAB VII** BAB IV **BAB VI** PERENCANAAN PERSIAPAN PENGADAAN PELAKSANAAN PENGADAAN PELAKSANAAN PENGADAAN PENGADAAN BARANG/JASA BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA PENGADAAN BARANG/ PENGADAAN TENDER/SELEKSI PENGECUALIAN
 PENELITIAN BAB VIII JASA DALAM RANGKA BARANG/JASA DI INTERNASIONAL DAN PENGADAAN KHUSUS DANA PLN/HLN PENANGANAN KEADAAN **LUAR NEGERI** DARURAT BAB IX PERAN SERTA PENGGUNAAN PENGADAAN USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, PRODUK DALAM **USAHA KECIL** BERKELANJUTAN DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN **NEGERI** BAB XI **BAB XII** BAB X PENGADAAN BARANG/JASA SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, SECARA ELEKTRONIK DAN KELEMBAGAAN DAN PELAYANAN HUKUM **BAB XIII BAB XIV BAB XV** KETENTUAN LAIN-KETENTUAN KETENTUAN PENUTUP LAIN PERALIHAN



Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

"Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan"



Garis Besar PBJP

Perencanaan

Identifikasi Kebutuhan (mulai)

Penetapan Barang/Jasa

Cara

Jadwal

Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

Perencanaan Pengadaan terdiri atas: Perencanaan PBJ melalui Swakelola dan/atau Penyedia

Persiapan



Persiapan Swakelola

Penetapan sasaran

Penyelenggara Swakelola

Rencana Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan

RAB

Persiapan PBJ Melalui Penyedia

Menetapkan HPS

Menetapkan rancangan Kontrak

Menetapkan spesifikasi teknis/KAK

 \leq

۵

Д

Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga

Pokja Pemilihan: persiapan pemilihan

Pelaksanaan

Pelaksanaan PBJ melalui Swakelola

Pelaksanaan Swakelola Tipe (I, II, III, IV)

Pembayaran Swakelola

Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia

Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan kontrak

Serah Terima Hasil Pekerjaan (Selesai)



........

- Pengertian terkait PBJP
- Ruang Lingkup PBJP
- Jenis Pengadaan pada PBJP
- Cara Pelaksanaan PBJP



Ruang Lingkup PBJP

Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Institusi Pengguna Barang/Jasa



- Kementerian
- Lembaga
- Perangkat Daerah

Anggaran belanja yang digunakan



- APBN/APBD
- Pinjaman DN dan/atau hibah DN yang diterima Pemerintah/Pemda
- Pinjaman LN atau hibah LN

- Pengertian terkait PBJP
- Ruang Lingkup PBJP
- Jenis Pengadaan pada PBJP
- Cara Pelaksanaan PBJP



Jenis Pengadaan pada PBJP



Barang



Pekerjaan Konstruksi



Jasa Konsultansi



Jasa Lainnya

PBJ DAPAT DILAKUKAN SECARA TERINTEGRASI



Jenis Pengadaan pada PBJP



Barang (B)

 Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.



Pekerjaan Konstruksi (PK)

 Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Jenis Pengadaan pada PBJP



Jasa Konsultansi (JK)

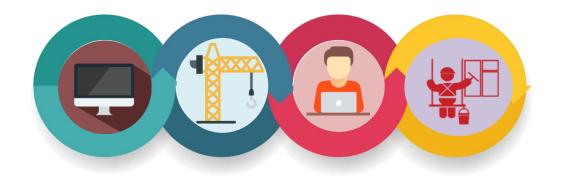
 Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.



Jasa Lainnya (JL)

 Jasa non-Konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

PBJ Terintegrasi



Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara terintegrasi



Pekerjaan Terintegrasi



Pekerjaan Terintegrasi mencakup seluruh jenis pengadaan.

Contoh antara lain:

- Pekerjaan Rancang Bangun (Design and Build)
- 2. Pekerjaan IT Solution
- 3. Pekerjaan *EPC*
- Pekerjaan Pembangunan,
 Pengoperasian dan Pemeliharaan
- 5. dll.



- Pengertian terkait PBJP
- Ruang Lingkup PBJP
- Jenis Pengadaan pada PBJP
- Cara Pelaksanaan PBJP



Cara Pelaksanaan PBJP



Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat



Cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha





Terimakasih

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

